

LAIN-LAIN –PEMPENTUKAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 25 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 54 Ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat Kabupaten/Kota”. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU no. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 3 Tahun 2006; Perpres No 1 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2009; Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan dan Kedudukan;
Bagian Kesatu : Pembentukan
Bagian Kedua : Kedudukan
 3. Tugas dan Fungsi;
 4. Susunan Organisasi;
 5. Tata Kerja;
 6. Eselon;
 7. Pengangkatan dan Pemberhentian;
 8. Pembiayaan;
 9. Ketentuan Lain;
 10. Ketentuan Penutup.Dan di lengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :
 1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Daerah

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2013.

CATATAN : -